

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan judul Urgensi Bai'at Dalam Kepemimpinan (Studi Hadits Tentang Bai'at Dalam Sunan Abi Dawud Nomor Indeks 4248). Penelitian ini dimaksudkan untuk beberapa hal, *pertama*, mendeskripsikan kehujjahan hadits tentang urgensi bai'at dengan nomor indeks 4248 dalam koleksi Sunan Abi Dawud; *kedua* untuk mendeskripsikan persepsi ulama hadits dalam memahami konsep bai'at yang diajarkan Rasulullah; dan *ketiga* untuk mendeskripsikan konsekwensi logis yang timbul akibat terjadinya bai'at.

Langkah penelitian dimulai dengan pengelompokan data-data terkait kemudian diadakan pemilahan dan klasifikasi data. Setelah data terklasifikasi secara sistematis sesuai dengan poin pembahasan yang direncanakan, maka dilakukan penyusunan hasil-hasil penelitian. Metode *takhrij* digunakan untuk mengolah data-data tersebut dengan memperbantuan kitab-kitab *ulūm al-hadīts* dan kitab koleksi hadits. Selanjutnya ditempuh upaya *i'tibār* serta olah matan dengan konsep *muqābalah*, yaitu *cross check* objek penelitian dengan kandungan al-Qur'an, kitab koleksi hadits dan pendekatan sejarah.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadits nomor indeks 4248 dalam koleksi Sunan Abi Dawud ini terbukti berpredikat shahih, baik dari aspek sanad maupun aspek matannya. Substansi doktrinal yang diusung melalui hadits ini sejalan dengan pesan-pesan Al-Qur'an, dan memiliki korelasi dengan hadits-hadits shahih yang lain. Oleh karena itu, maka hadits ini layak dijadikan hujjah dan pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan yang menganut konsep Islami. Bai'at merupakan metode syara' satu-satunya dalam rangka memilih dan mengangkat seorang penguasa oleh umat. Dengan bai'at, penguasa dinyatakan sah secara hukum untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah. Dengan terlaksananya bai'at, umat memiliki kewajiban untuk taat, sebagaimana penguasa berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan dan menjaga hak umat. Bai'at merupakan bukti legalitas kekuasaan. Oleh karena itu, dengan sahnya seseorang sebagai penguasa maka akan menutup kesempatan bagi yang lain untuk merebut kekuasaan dan memperoleh bai'at. Jika hal itu terjadi, maka pihak yang ingin merebut kekuasaan dianggap makar dan harus ditumpas demi utuhnya pemerintahan Islam. Sementara itu, sumpah jabatan yang diberlakukan di Indonesia pada setiap pelantikan, merupakan aktualisasi dari bai'at yang berlaku pada sistem pemerintahan Islam.

Terkait dengan kesimpulan tersebut, maka kepada semua kalangan baik akademisi maupun yang lainnya, khususnya yang bergelut di bidang hadits untuk mengoptimalkan penelitian demi menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan akurat.